

## Aset DKI Diduga Diduduki Swasta dan Perorangan

JAKARTA (IM) - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengakui pernah mengusulkan kepada pimpinan legislatif untuk membentuk panitia khusus atau pansus-pengawasan aset DKI.

Melalui pansus tersebut, kata Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/6), pihaknya akan melakukan penelusuran dan pengawas secara ketat terkait aset milik DKI yang diduga ditempati oleh pihak swasta ataupun perorangan.

Dengan adanya pansus tersebut, Inggard berkeyakinan pengawasan aset DKI Jakarta yang dilakukan legislatif dan eksekutif akan lebih maksimal.

Dia juga mengakui selama ini banyak oknum yang terlibat dalam permainan aset Pemprov DKI Jakarta. "Kan banyak oknum-oknum yang bermain, ini yang harus kita patahkan. Sehingga tidak merugikan pemerintah daerah," kata Inggard.

Menurut Inggard, para oknum yang terdiri dari pihak swasta dan pemerintah daerah tersebut sudah "bermain" sejak lama dalam

transaksi aset tersebut.

Dia menilai aset berupa lahan atau bangunan yang seharusnya bisa digunakan untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) malah dipakai warga perorangan ataupun swasta demi kepentingan pribadi.

Inggard pun menilai pihak pemerintah kota selaku pengawas aset DKI terkesan membiarkan hal tersebut terjadi.

"Oh sudah pasti, itu (pihak swasta) dijadikan 'ATM' (anjungan tunai mandiri) sehingga tidak pernah diserahkan itu fasos fasum. Sebenarnya kalau mereka (swasta) belum menyerahkan fasos fasum, jangan dikasih izin IMB-nya (izin mendirikan bangunan)," jelas dia.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menertibkan aset tetap berupa fasos dan fasum.

"Penatausahaan penyerahan dan pencatatan aset tetap fasos-fasum belum tertib," kata Anggota V BPK RI, Ahmad Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



## 3D PRINT FEST

Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) K. Teguh Santoso (kanan) berbingbang dengan Head of 3D Printing Business Consumer and Commercial Segment AXI Leonardo Kurniawan (kiri) dan Peserta kompetisi 3D printing Virginia Putri (tengah) dalam kegiatan 3D Print Fest di Creative Hall, Mbloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). 3D Print Fest merupakan rangkaian kegiatan edukasi teknologi 3D printing kepada siswa-siswi kejuruan SMK dan vokasi se-Jakarta yang diselenggarakan AXI hingga bulan Juni 2023.

## DIPROTES KOALISI PEJALAN KAKI

# DKI Akan Koordinasi dengan Kemenlu Soal Trotoar di Depan Kedubes AS

Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unsur Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak, kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) soal penutupan trotoar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni mengaku telah menerima aspirasi

dari masyarakat yang ingin trotoar itu bisa dilintasi. Namun, Wiwik juga mengatakan pada area tersebut juga terdapat perimeter pengamanan Kedubes.

"Maka Dinas Bina Marga akan berkoordinasi dengan unsur Pemprov DKI Jakarta terkait dan juga dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua

pihak," kata Wiwik saat dihubungi, Selasa (6/6).

Koalisi Pejalan Kaki mengeluhkan penutupan trotoar yang berada di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Keluhan itu telah disuarakan sejak lama.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Andrea Sitorus mengatakan mereka telah memprotes penutupan itu sejak Presiden Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi kan yang harus kita pahami bersama bahwa kedaulatan negara, trotoar itu kan masih milik Indonesia. Perkarra pengamanan kita tidak ikut campur, tapi ini bicara ruang publik yang dirampas dan pemerintah kita, seakan-akan tidak be-

rani komunikasi dengan pihak Amerika," kata Alfred saat dihubungi, Selasa (6/6).

Ia mengatakan trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan baru selesai direvitalisasi oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Namun, revitalisasi hanya dilakukan hingga depan Istana Wakil Presiden.

Selain akses yang ditutup, trotoar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat memang terlihat berbeda dengan trotoar di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.

"Yang jadi keprihatinan itu, pejalan kaki volume tinggi di sana, itu semua pejalan kaki bertaruh nyawa di depan Kedutaan Amerika, karena harus ke jalan raya dan tidak ada proteksi," katanya.

Alfred pun menyarankan agar akses di depan Kedubes AS yang terhalang itu dibuka. Selain itu, revitalisasi trotoar disarankan untuk dilanjutkan.

"Solusinya buka saja dulu trotoarnya, biarkan pejalan kaki bisa mengakses itu, dan segera bangun lanjutan sisa trotoar ke arah Ridwan Rais. Nanti bicara teknis pengamanan bisa dari Kemenlu dan Kedutaan," katanya.

Alfred Sitorus mengatakan, permasalahan ini sudah terjadi sejak lama, tepat saat era kepemimpinan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Dari

jaman Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI. Kami sudah menyampaikan itu kepada Pemprov DKI Jakarta agar fasilitas publik yang merupakan hak dasar pejalan kaki harus dibuka yang di depan Kedubes AS," ujar Alfred.

Alfred mengatakan, penutupan trotoar itu terjadi saat Kedubes AS direnovasi pada 2013 lalu. Penutup trotoar di depan Kedubes AS saat itu tak jauh berbeda dengan saat ini yang menggunakan barrier dan kawat berduri. "Nah kalau dulu tidak sampe kawat duri. Jadi terlihatlah paranoidnya. Maksud saya gini, saya tidak masuk ke dalam permasalahan kedutaan Amerika. Tapi trotoar itu masih dalam kedaulatan republik Indonesia, gitu," ucap Alfred.

Alfred pun membandingkan kondisi sekitar Kedubes AS ini dengan kedutaan negara lain yang berada di HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut Alfred banyak keberadaan kedubes negara lain di kawasan Setiabudi itu, namun tidak melakukan penutupan pedestrian.

"Perbedaannya dengan kedutaan-kedutaan lain apa sih, Kedutaan Jerman, Jepang, Prancis, Spanyol dan banyak kedutaan di sepanjang HR Rasuna Said itu tu fine aja trotoarnya tidak jadi masalah," ucap Alfred. ● yan

## Dinding Turap Jebol, Rumah Warga Cilodong Jadi Miring ke Arah Kali

DEPOK (IM) - Rumah warga di Jalan Kampung Kali Baru, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, menjadi miring setelah dinding turap rumah tersebut jebol.

Madih (60), pemilik rumah tersebut, mengatakan bahwa kediamannya miring ke arah kali gara-gara dinding turap rumah jebol untuk kedua kalinya pada Senin (5/6).

"Pas (dinding turap jebol) pertama, itu belum miring. Kemarin, setelah (turap jebol) yang kedua, itu langsung miring. Narik ke arah sana (arah kali)," kata dia saat ditemui di kediamannya, Selasa (6/6).

Selain miring, kediaman Madih juga mengalami kerusakan. Dinding dapur rumahnya retak. Madih pun merasa khawatir. Karena itu, ia dan enam anggota keluarganya sempat mengungsi

pada Senin kemarin. Ke-Rumah Madih mengungsi ke rumah kerabat yang juga berlokasi di Jalan Kampung Kali Baru.

"Keluarga saya sampai pada mengungsi karena khawatir. Tapi, tadi pagi sudah pulang lagi ke sini," tutur Madih.

Dalam kesempatan itu, ia berharap Pemerintah Kota Depok bisa segera menurap dinding kediamannya. "Ya harapannya biar Pemkot Depok bisa paten memperbaiki (dinding turap yang jebol)," sebut Madih.

Untuk diketahui, dinding turap kediaman Madih pertama kali jebol dua pekan lalu. Kemudian, dinding turap itu kembali jebol pada Senin kemarin.

Dinding turap kediaman Madih jebol lantaran tergerus aliran air yang deras dari kali di belakang rumah tersebut. ● yan

## DKI Enggan Komentari Dugaan Konflik Internal hingga Proyek Mangkrak Ancol

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono enggan mengomentari dugaan konflik internal hingga proyek mangkrak Ancol. Nasruddin justru meminta agar isu itu ditanyakan langsung ke PT Pembangunan Jaya Ancol.

"Mungkin ya, coba tanya Ancol aja deh. Saya enggak mau komen terkait hal tersebut," kata dia saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Dia hanya mengatakan, BP BUMD DKI akan terus melakukan pengawasan.

"Kami akan selalu monitor performance, indikatornya, dan sebagainya," ucap dia.

Sebelumnya, eks Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Trikasih Lembong membongkar se-

jumlah masalah yang ada di tubuh perusahaan Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal.

Thomas menyebut, pembangunan hotel bintang lima yang berada persis di samping Putri Duyung mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Tak hanya itu, pembangunan ABC Mall atau Ancol Beach City pun mandek akibat konflik internal. Menurut dia, pengelolaan operasional aset mal ini dipegang dua perusahaan yang berkongsi.

"Padahal, dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional, lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak," kata Thomas Lembong soal proyek mangkrak Ancol dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, 5 Juni 2023.

Sementara Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan permasalahan yang tengah terjadi di tubuh perusahaan Ancol bukan menjadi urusannya.

Oleh karena itu, dia enggan berkomentar soal adanya sejumlah masalah di tubuh perusahaan berpelat merah ini, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal.

"Urusan Ancol, tanya Ancol," kata Heru Budi saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, (6/6). ● yan

## Pemkot Depok Minta Ortu Lapor Jika Ada Murid SDN Pocin 1 Depresi

DEPOK (IM) - Pengacara wali murid SDN 1 Pondok Cina (Pocin), Depok, Jawa Barat, Deolipa Yumara, menyebut para siswa mengalami depresi buntut kisruh pengurusan. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meminta wali murid melapor ke Dinas Pendidikan (Disdik) Depok jika ada siswa yang depresi.

"Pihak orang tua atau wali murid bisa melapor ke Disdik," kata Kadisdik Depok, Siti Chaerijah saat dihubungi, Selasa (6/6).

Siti mengaku turut prihatin jika ada siswa yang depresi. Dia pun meminta data siswa untuk dikirimkan ke pihaknya guna ditindaklanjuti.

"Saya turut prihatin. Mohon jika ada data siswa depresi, berkenan dikirim ke Disdik untuk ditindaklanjuti," ungkapnya.

Sebelumnya, murid-murid SDN Pondok Cina (Pocin) 1 Depok disebut mengalami gejala distres, yaitu depresi dan cemas, imbas kisruh pengurusan sekolah. Kuasa hukum wali murid SDN Pocin 1 Depok, Deolipa Yumara, mengatakan hal itu terungkap setelah dilakukan pemeriksaan psikologis.

"Mereka mengalami distres. Distres ini mengalami kecemasan dan depresi. Jadi ketika mereka dilakukan pengetestan terhadap kondisi kejiwaannya, mere-

ka mengalami kondisi depresi dan kecemasan," kata Deolipa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/6).

Deolipa mengatakan gangguan emosional yang dialami siswa itu berdampak pada dunia akademik mereka. Selain itu, para murid mengalami gangguan motivasi dalam belajar.

"Ini membuat gangguan motivasi mereka dalam belajar dan acuan mereka dalam akademik dan proses belajar terganggu sehingga rasa rasanya mereka dalam kondisi yang buruk. Itu hasil dari tes psikologi dari UI, khususnya dari Divisi Kesehatan Mental Fakultas Kesehatan UI," ujarnya. ● yan



## BNN PROVINSI BANTEN TANGKAP DUA PENGEDAR SABU

Kepala Badan Narkotika nasional (BNN) Provinsi Banten Rachmad Rasnova (kedua kanan) memperlihatkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,3 kilogram saat ekspos di Serang, Selasa (6/6). Aparat BNN Provinsi Banten menyita sabu yang dibawa tersangka A (51) di Tol Merak dalam perjalanan dari Aceh untuk dikirim kepada tersangka IS (51) di Jakarta.

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT CATUR ABADI INVESTAMA berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") tertanggal 5 Juni 2023, telah diputuskan untuk menuntaskan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan yang semula masing-masing sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Kepada para kreditor yang keberatan atas penurunan modal tersebut dapat mengajukan keberatan melalui surat tercatat disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini yang ditujukan kepada alamat di bawah ini dengan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:  
PT CATUR ABADI INVESTAMA  
Kompleks Perkantoran Pulomas Blok III no. 6,  
Jl. Perintis Kemerdekaan, RT/RW 008/008,  
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung,  
Jakarta Timur - 13260  
Kantor Notaris STEPHANIE WILAMARTA, SH  
Plaza Kelapa Gading Blok G No. 50,  
Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading,  
Jakarta Utara 14240  
Pengumuman ini disampaikan untuk memantapkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Jakarta, 7 Juni 2023  
Direksi PT CATUR ABADI INVESTAMA